

**TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI
DAN PAJAK IMPOR DALAM INDUSTRI TELEPON GEGGAM DIKAITKAN
DENGAN PRINSIP *NATIONAL TREATMENT***

**FIKY MARTINO
1287032**

ABSTRAK

Prinsip *National Treatment* merupakan salah satu prinsip dalam ketentuan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO), dan telah meratifikasi semua peraturan WTO beserta lampiran-lampirannya yang salah satunya adalah ketentuan GATT, harus tunduk terhadap keseluruhan peraturan WTO tersebut. Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69 Tahun 2014 tentang Ketentuan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Elektronika dan Telematika serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain yang berkaitan dengan konsistensi terhadap prinsip *National Treatment*.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada asas-asas hukum dan hukum positif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dalam prinsip *National Treatment* dalam Ketentuan GATT. Sumber hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing of The World Trade Organization*, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69 Tahun 2014 tentang Ketentuan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Elektronika dan Telematika, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Indonesia dalam beberapa kebijakannya ditemukan ketidak konsistenan terhadap prinsip *National Treatment*. Indonesia sebagai anggota WTO seharusnya tunduk terhadap peraturan-peraturan WTO. Dikeluarkannya Peraturan mengenai kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri telah melanggar prinsip *National Treatment* yang menyatakan bahwa pengaturan mengenai penggunaan kandungan komponen dalam negeri tidak diperbolehkan diterapkan oleh anggota. Jika Indonesia dinyatakan melanggar ketentuan WTO, maka WTO akan memberikan keleluasaan bagi negara lain yang dirugikan oleh kebijakan tersebut untuk melakukan “Tindakan Pembalasan” seperti, penghentian kerjasama impor dengan negara yang bersengketa ataupun berupa kenaikan nilai pajak terhadap barang yang diimpor Indonesia ke negara lain.

Kata Kunci: *National Treatment*, Pajak Impor Dalam Industri Telepon Geggam, Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri

JURIDICIAL REVIEW ABOUT THE POLICY OF DOMESTIC CONTENT LEVEL AND IMPORT TAX IN MOBILE PHONE INDUSTRY ASSOCIATED WITH THE PRINCIPLE OF NATIONAL TREATMENT

FIKY MARTINO

1287032

ABSTRACT

The principle of National Treatment is one of the principles in the provisions of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Indonesia as a member of the World Trade Organization (WTO), and has ratified all the rules of the WTO and its annexes, one of which is the provision of the GATT, should be subject to the overall regulation of the WTO. Indonesia has issued Ministry of Trade Decree Number 69 Year 2014 Regarding Provisions on Procedures for Calculation of Domestic Component Value of Industrial Electronics and Telematics and the Ministry of Finance Decree No. 175 / PMK.011 / 2013 Regarding the Second Amendment to the Finance Minister Decree Number 154 / PMK.03 / 2010 On Income Tax Collection Article 22 relating to Payments for Goods Delivery And Activity for Import Or Other Business Activities in the field with regard to the consistency of the principle of National Treatment.

This thesis research method is normative juridical research which refers to the general principles of law and positive law. The nature of the research is descriptive analytics in the principle of National Treatment in the provision GATT. Sources of primary law used is Law No. 7 of 1994 on ratification of Agreement Establishing of the World Trade Organization, the Ministry of Trade Decree No. 69 year 2014 Regarding Provisions on Procedures for Calculation of Domestic Component Value of Industrial Electronics, and Minister of Finance Decree No. 175 / PMK.011 / 2013 Regarding the Second Amendment to the Finance Minister Decree Number 154 / PMK.03 / 2010.

The results showed that some of Indonesia's regulations are not consistent with the principle of National Treatment. Indonesia as a member of the WTO should be subject to the rules of the WTO. The enactment of the policy content from local industry has violated the principle of National Treatment which states that the regulations concerning the use of component content in the country are not allowed to be applied by its members. If Indonesia is declared violate the WTO's provisions, then WTO has a right to give flexibility for another country that is harmed by this policy to do "A Retaliatory Action", such as , the cessation of import with dispute state or a rise in value in the form of tax on imported goods by Indonesia to another country.

Key Word: National Treatment, Import Tax In Mobile Phone Industry, The Policy of Domestic Content Level

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Keaslian Naskah	ii
Halaman Pernyataan Publikasi Laporan Penelitian.....	iii
Halaman Persetujuan Revisi Skripsi	iv
Halaman Pengesahan	v
Halaman Persetujuan Panitia Sidang	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Kerangka Pemikiran.....	16
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI DAN PAJAK IMPOR DALAM INDUSTRI TELEPON GENGAM DI INDONESIA	26
A. Pengaturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri Untuk Industri Elektronik dan Telematika.....	26
1. Pengaturan Kebijakan TKDN Dalam Ketentuan WTO.....	27
2. Pengaturan Kebijakan TKDN Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69 Tahun 2014.....	29
B. Latar Belakang Pemerintah Indonesia Menerapkan Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri.....	33

C. Pengaturan Pajak Impor Dalam Industri Telepon Genggam.....	36
1. Pengertian hukum pajak.....	36
2. Jenis - jenis pajak.....	38
3. Jenis - jenis pajak penghasilan.....	40
4. Pajak penghasilan dalam bidang Impor.....	43
D. Industri Telepon Genggam di Indonesia.....	44
1. Pajak Impor dalam Industri Telepon	47
2. Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Telepon Genggam.....	49
BAB III PRINSIP NATIONAL TREATMENT DI INDONESIA.....	52
A. Tinjauan Umum Perjanjian Internasional.....	52
1. Pengertian dan istilah perjanjian internasional	52
2. Bentuk-bentuk perjanjian Internasional.....	61
3. Proses Ratifikasi Di Indonesia.....	68
4. Munculnya <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i> (GATT) dan <i>World Trade Organization</i> (WTO).....	70
B. Prinsip – Prinsip Dalam GATT.....	73
1. Prinsip <i>Most Favoured Nation</i>	73
2. Prinsip <i>National treatment</i>	75
3. Prinsip Larangan Restriksi (Pembatasan) Kuantitatif...	79
4. Prinsip Perlindungan Melalui Tarif	80
5. Prinsip Resiprositas.....	80
C. Penerapan Prinsip <i>National Treatment</i> Di Indonesia.....	81
1. Undang-Undang yang meratifikasi perjanjian GATT...	81
2. Penerapan Prinsip <i>National Treatment</i> Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69 Tahun 2014...	83

	3. Penerapan Prinsip <i>National Treatment</i> Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013.....	84
	4. Akibat Hukum Dalam Penerapan Prinsip <i>National Treatment</i>	87
BAB IV	PEMBAHASAN	90
	A. Analisa Konsistensi Penerapan Prinsip <i>National Treatment</i> Dalam ketentuan GATT terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 di Indonesia.....	90
	B. Bentuk diskriminasi terhadap barang impor dalam bidang industri telepon genggam melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013.....	98
	C. Sanksi bagi Indonesia jika dinyatakan melanggar prinsip <i>National Treatment</i> dalam ketentuan GATT.....	102
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	106
	A. Kesimpulan.....	106
	B. Saran.....	108
	DAFTAR PUSTAKA	110
	LAMPIRAN	
	CURRICULUM VITAE	
	MATRIX REVISI	

DAFTAR LAMPIRAN

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69 Tahun 2014 tentang Ketentuan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Elektronika dan Telematika.....	111
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.....	135
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.....	143

